

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola perekonomiannya, sehingga desa dapat lebih aktif dalam mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi daerah, desa dapat membuat keputusan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perekonomian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga terwujudnya pendirian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola perekonomian sendiri.

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. BUMDes dapat berbentuk koperasi, perseroan terbatas (PT), atau bentuk usaha lainnya.

Berdasarkan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*: “BUMDes adalah lembaga usaha desa yang didirikan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan serta bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Prinsip dalam mengelola BUMDes meliputi aspek kooperatif, partisipatif, dan emansipatif yang mengedepankan partisipasi seluruh komponen dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, Undang-Undang Desa menegaskan peran partisipasi masyarakat dalam pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes”

Dengan demikian melalui BUMDES, masyarakat dilibatkan atau diberikan kesempatan dalam berpendapat, berdiskusi serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa tersebut terutama didalam kegiatan-kegiatan atau program yang memang berkaitan dengan desa tersebut. Pelibatan masyarakat

sejak awal dapat meminimalisir perdebatan atau konflik di antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa.

Hal ini didasari dari salah satu kajian yang peneliti temukan dalam Jurnal yang berjudul Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Studi Kasus: BUMDesa Tirta Mandiri Ponggok yang dimana BUMDES Tirta Mandiri ponggok merupakan BUMDES yang pernah meraih penghargaan BUMDES percontohan tingkat nasional tahun 2017. Kajian tersebut menjelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan BUMDES adalah adanya partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat tercermin dari unsur pengelola yang sebagian besar berasal dari masyarakat desa Ponggok. Masyarakat desa ponggok ikut menanamkan modalnya dalam BUMDES sehingga secara langsung memiliki dan menikmati hasil atau laba BUMDES. Selain itu dalam waktu tertentu seluruh pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Melalui BUMDES masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Adapun bentuk-bentuk BUMDES; (1) BUMDES sebagai pelaku usaha yang merupakan badan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa, (2) BUMDES sebagai penyedia layanan yang berperan sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, (3) BUMDES sebagai penggerak ekonomi desa yang menjadi penggerak ekonomi desa dengan memberdayakan masyarakat melalui program-program ekonomi yang dilaksanakan, (4) BUMDES sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang juga berperan dalam memberdayakan masyarakat desa melalui program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi mereka. (Amirya, 2016)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa: (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi

tepat guna, meliputi: (a) air minum Desa, (b) usaha listrik Desa, (c) lumbung pangan, (d) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Namun demikian ditemukan dalam realitasnya bahwa BUMDES juga menghadapi situasi yang berbeda. Hal ini didasari dari salah satu kajian yang peneliti temukan terkait dengan tantangan serta hambatan yang harus dihadapi oleh BUMDES dalam realitanya. Dalam kajian yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa ditemukan permasalahan kurangnya modal dalam mendirikan BUMDES serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban bagi BUMDES belum dapat dioptimalkan. Sehingga adakalanya BUMDES menghadapi situasi atau berada pada permasalahan tertentu, seperti keterbatasan modal dan sumber daya. Hal tersebut menjadi hambatan dalam memulai atau mengembangkan usaha BUMDES. Selain itu, masalah lainnya juga terkait dengan kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha, serta kurangnya keterampilan dalam merencanakan dan mengelola keuangan. Hal-hal sebagaimana disebutkan diatas tentu mengakibatkan kinerja BUMDES tidak optimal dan menghambat tercapainya pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa.

Adapun alasan peneliti untuk mengkaji persoalan terkait dengan BUMDES adalah BUMDES memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di tingkat desa. Dibandingkan dengan bidang lain, BUMDES memiliki keunikan sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal dan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan mengkaji BUMDES, maka akan dapat memahami secara lebih mendalam tentang dinamika ekonomi di level desa, pola kemitraan antarwarga, serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola usaha mikro dan kecil. Kajian terkait BUMDES dapat mendukung perkembangan BUMDES dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian secara khusus mengkaji masalah BUMDES yang ada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kediri yaitu Desa Padangan. Kabupaten Kediri merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMD) Kabupaten Kediri terdapat 282 desa yang terdaftar memiliki BUMDES dari 343 desa yang ada. Adanya ratusan yang terdaftar hanya ada 79 unit usaha yang masuk dalam kategori maju.

Berdasarkan data, Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.001 jiwa, yang terdiri dari 3465 laki-laki dan 3536 perempuan. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) di desa tersebut sebanyak 2.500 orang. Sektor usaha di Desa Padangan meliputi beberapa bidang seperti di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang peternakan, di bidang perikanan, di bidang industri kecil, menengah dan besar, dan di bidang jasa dan perdagangan dengan pendapatan perkapita sejumlah 1.105.598,86605. Adapun unit usaha yang dikelola oleh BUMDes desa Padangan meliputi ruko pelayanan pencairan BPNI dan melayani pembayaran pajak yang merupakan jasa pelayanan pada warga.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pembangunan desa, kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dari setiap perencanaan pembangunan desa. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah yang berperan sebagai pelaksana dan juga masyarakat dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang merupakan salah satu program pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa di bidang ekonomi.

Kehadiran BUMDES tentunya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal masyarakat desa. Desa Padangan merupakan salah satu desa yang turut melaksanakan atau mengadakan program BUMDES. Keberadaan BUMDES di Desa Padangan sudah ada sejak tahun 2017 silam namun pada pelaksanaannya BUMDES di Desa Padangan belum dapat berjalan dengan baik selama satu tahun penuh.

Saat ini pemerintah Desa Padangan terus berupaya untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan BUMDES tersebut dengan melakukan perombakan kembali kepengurusan BUMDES sebelumnya di tahun kedua pelaksanaan BUMDES di Desa Padangan. Perombakan tersebut dilakukan karena pemerintah Desa Padangan merasa bahwa dalam kepengurusan sebelumnya belum ada optimalisasi dan juga keseriusan dalam proses pembentukan BUMDES sehingga hal tersebut dianggap menjadi salah satu penyebab adanya kegagalan BUMDES pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2022 BUMDES berjalan dengan kepengurusan yang baru namun dalam prosesnya BUMDES di Desa Padangan kembali

mengalami kegagalan untuk kedua kalinya karena tidak adanya program yang berjalan pada saat itu terlebih adanya hambatan atau kendala pada dana untuk pengelolaan BUMDES.

Setelah melewati dua kegagalan dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Padangan akhirnya kembali merencanakan pelaksanaan BUMDES di tahun 2023. Merencanakan pengelolaan BUMDES tahun 2023 adapun persiapan yang telah disiapkan oleh pemerintah Desa Padangan yaitu menyiapkan anggaran, pembentukan ulang kepengurusan BUMDES, menyiapkan program atau proyek yang akan dilakukan oleh BUMDES, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam program dan proyek BUMDES tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki beberapa bentuk, seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Namun, dalam realitasnya, partisipasi masyarakat masih sering menemui kendala seperti rendahnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat melalui komunikasi dan edukasi yang berfokus pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta melalui pengembangan budaya politik yang demokratis.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa hal yang akan diteliti dan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES di Desa Padangan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas adapun tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES di Desa Padangan.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki signifikansi yang penting dalam konteks pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memahami tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini dapat mengkaji peran BUMDES sebagai instrumen pengembangan ekonomi dan sosial di tingkat desa, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah guna melibatkan dan memberdayakan warga desa untuk berperan aktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, mengkaji pola partisipasi masyarakat di sejumlah desa sesuai dengan karakteristik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak positif dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan tingkat desa.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan hasil kajian pustaka terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pengelolaan BUMDES di Desa Padangan Kabupaten Kediri Tahun 2017-2023, sebagai berikut:

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Variabel	Hasil	Perbedaan
Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan BUMDesa Tirta Mandiri: Studi Kasus Desa Pongok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten	Lisa Mustika (Skripsi, 2019)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi	BUMDES, <i>Community Development</i> , Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian yaitu diketahui bahwa partisipasi masyarakat terhadap BUMDES Tirta Mandiri berada pada tangga citizen power berupa <i>partnership</i> dan <i>delegated power</i>	1. Terkait dengan fokus penelitian, maka dari sejumlah penelitian terdahulu, penelitian ini lebih menitikberatkan kajian terhadap bentuk dan pola partisipasi masyarakat
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur	Ryanti Tiballa (Jurnal, 2017)	Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Partisipasi Masyarakat, Program	Hasil penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Swarga masih terbaats pada partisipasi tidak langsung	2. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus.

--	--	--	--	--	--



<p>Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan.</p>	<p>Nafida Arumdani, Arimurti Kriswibowo (Jurnal, 2022)</p>	<p>Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>Partisipasi Masyarakat, BUMDES</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah pengurus BUMDes Tugu Kuning memiliki kemampuan, keterampilan dan pengalaman organisasi yang baik serta rasa keterikatan dan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan BUMDes mereka didukung Pemerintah Desa Dadapan dengan memberikan fasilitas penuh terhadap program yang ada di BUMDes.</p>	
<p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang</p>	<p>Dipha Rizka Humaira (Skripsi, 2022)</p>	<p>Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan</p>	<p>Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDES masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDES masih sedikit. Tahap seleksi lokasi, pemerintah desa sudah baik dalam</p>	

				proses pemilihan telah melalui bidang usaha BUMDES, melalui musyawarah khusus internal desa, dan musyawarah khusus.	
Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Studi Kasus: BUMDES Tirta Mandiri Ponggok	Akhmad Priharjanto, Nina Andrina (Jurnal, 2021)	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif studi kasus yang menggambarkan bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES Tirta Mandiri Ponggok	BUMDES, Partisipasi Masyarakat, Kepemilikan Modal	Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat pada BUMDES Tirta Mandiri Ponggok dilaksanakan dengan pola yang luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan kepemilikan modal.	

State of the Art

Penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu di dalam sekian banyak riset belum ada lokusnya secara spesifik mengarah kepada Desa Padangan di Kabupaten Kediri. Desa ini memiliki penduduk sekitar 6.839 jiwa. Desa Padangan memiliki budaya dan tradisi yang kuat, dengan adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat contohnya pertunjukan wayang dan juga karnaval saat 17 Agustus. Desa Padangan memiliki penghasilan utama dari pertanian dengan masyarakatnya berkebun dan menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, dan lainnya. Desa Padangan juga memiliki fasilitas umum yang relatif lengkap seperti rumah sakit, sekolah, masjid, dan pasar. Kemudian, dengan bentuk usaha BUMDES yang ada di Desa Padangan yang berbeda dengan bentuk usaha BUMDES pada penelitian terdahulu yang lebih kepada pelayanan jasa. Maka tentunya, pola partisipasi ini akan cenderung berbeda dibandingkan dengan bentuk BUMDES lain yang berfokus pada hasil pertanian, makanan, dan lainnya. Penelitian ini juga menitikberatkan pada partisipasi masyarakat secara politik dan menentukan bentuk partisipasi yang digunakan dalam prosesnya.

1.7 Landasan Teoritik

1.7.2 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam demokrasi adalah proses dimana masyarakat aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam demokrasi karena masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan proyek, dan pengawasan.

Bentuk Partisipasi

Cohen dan Uphoff (1980) membagi bentuk partisipasi dalam 4 tahapan, tahap pertama yaitu tahap pengambilan keputusan (*decision making*). Tahap selanjutnya adalah tahapan

implementasi (*implementation*). Selanjutnya yang ketiga adalah bentuk partisipasi dalam tahap menikmati keuntungan (*benefit*), dan yang terakhir adalah tahap partisipasi dalam evaluasi (*evaluation*). Pada tahap ini bentuk partisipasi hanya dibagi dua yaitu evaluasi secara langsung dan evaluasi secara tidak langsung. Lebih lanjut Cohen dan Uphoff membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

1. *Participation in Decision Making* (Partisipasi dalam pengambilan keputusan)
2. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan)
3. *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat)
4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi)

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi, sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Dalam hal ini partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. (Ferdinan Kalesaran, 2015)

Tangga Partisipasi oleh Arnstein

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat

wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. (Arnstein 1986 dalam Wicaksono 2010).

Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah berpartisipasi maka perlu dilakukan pengukuran tingkat partisipasi masyarakat. Diakhir tahun enam puluhan Arnstein mengemukakan *ladder of citizen participation* atau sebuah tangga partisipasi masyarakat yang terdiri dari delapan anak tangga yang menggambarkan tingkatan partisipasi. Tangga partisipasi Arnstein mempunyai delapan anak tangga yang terbagi dalam tiga kategori, dari yang terbawah yaitu anak tangga manipulasi dan terapi pada kategori nonpartisipasi, anak tangga penginformasian, konsultasi, dan penempatan pada kategori tokenisme, anak tangga kemitraan, pendelegasian, dan kontrol warga pada kategori derajat kekuasaan warga negara.

Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Tangga Partisipasi Arnstein (Rosyida, 2011)

No	Tangga/Tingkatan Partisipasi	Hakikat Kesertaan	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
1.	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada pasrtisipasi
2.	Terapi (<i>Therapy</i>)	Sekedar agar masyarakt tidak marah/sosialiasi	
3.	Pemberitahuan (<i>Informing</i>)	Sekedar pemberitahuan searah/sosialiasi	Tokenism/sekedar justifikasi agar mengiyakan
4.	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya	
5.	Penentraman (<i>Placation</i>)	Saran masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
6.	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
7.	Pendelegasian Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	

8.	Kontrol Masyarakat (<i>citizen control</i>)	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	
----	---	-------------------------------------	--

Sumber: Arnstein (1962:217) dalam Wicaksono (2010)

Tingkat pertama dalam tangga partisipasi Arnstein adalah manipulasi (*manipulation*) dalam tahap ini adalah fungsi pelibatan masyarakat hanya sebagai pelegalan kekuasaan. Kedua, adalah terapi (*therapy*) dalam tahap ini pelibatan masyarakat hanya dengan tujuan pembelajaran sehingga tidak ada tindak lanjut dari pelibatan tersebut. Ketiga adalah informing posisi masyarakat dalam tahap ini masih dilibatkan secara pasif yaitu hanya diinformasikan saja. Keempat yaitu konsultasi (*consultation*), pada tahap ini masyarakat tidak hanya diinformasikan namun, ada kegiatan konsultasi antara pemerintah dan masyarakat. Kelima, penempatan perwakilan (*placation*) pada tahap ini masyarakat mempunyai hak untuk menempatkan perwakilan di pemerintahan. Keenam, kemitraan (*partnership*) posisi pemerintah dan masyarakat menjadi setara dalam kewenangan dan tanggung jawab. Ketujuh, pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) pemerintah sudah mendelegasikan kekuasaannya pada masyarakat sehingga kewenangan masyarakat lebih tinggi. Kedelapan, masyarakat berkuasa (*citizen control*) dalam hal ini fungsi pemerintah semakin sedikit dan mayoritas kewenangan dan tanggung jawab ada pada masyarakat.

Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet, partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. (Suryono, 2001)

Slamet menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat dalam demokrasi yaitu: (Slamet, 2003)

1. Partisipasi politik (*political participation*)

Berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses ke pemerintahannya itu sendiri.

2. Partisipasi social (*sosial participation*)

Partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi.

3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*)

Partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga.

1.8 Bagan Alur Pemikiran

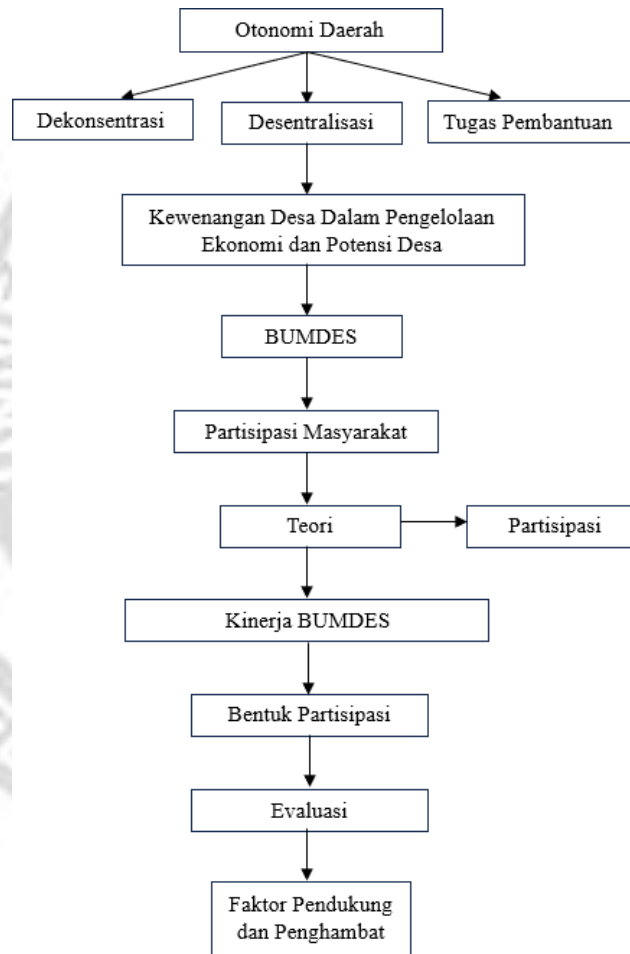
Bagan alur pemikiran akan menunjukkan bagaimana alur pemikiran peneliti. Peneliti mengawali pemikiran dengan melihat proses otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan tiga konsep utama yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi merujuk pada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi publik. Desentralisasi, disisi lain memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Dari konsep desentralisasi inilah muncul kewenangan desa dalam pengelolaan ekonomi dan potensi lokal. Desa ddiberi ruang untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki demi kesejahteraan

masyarakatnya. Salah satu dari kewenangan ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, meningkatkan pendapatan desa, dan menciptakan lapangan kerja bagi warga desa.

Keterkaitan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES menjadi tolak ukur penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan usaha desa. Teori partisipasi menjelaskan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap pengambilan keputusan dan operasional BUMDES sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab dan komitmen terhadap keberhasilan BUMDES.

Dalam evaluasi kinerja BUMDES, teori partisipasi digunakan untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan. Evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDES. Oleh sebab itu, penelitian ini akan meneliti itu dengan mengkaji berdasarkan teori partisipasi Cohen dan Uphoff, serta teori partisipasi Arnstein untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES. Sehingga hasilnya akan ditemukan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung partisipasi di Desa Padangan.

Gambar 1.8 Bagan Alur Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Menurut Moleong mendefinisikan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses. (Moloeng, 2007)

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku dan lainnya. Pendekatan penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES dirasa paling tepat menggunakan metode kualitatif karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami secara mendalam terkait persepsi, pengalaman, dan dinamika interaksi sosial yang kompleks di tingkat lokal, sehingga dapat memberikan pemahaman yang kontekstual dan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDES

1.9.2 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam buku *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*, John W. Creswell menulis bahwa studi kasus sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan

kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan mengikuti berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. (Creswell, 1998)

Pemilihan jenis penelitian studi kasus sebagai metode yang paling tepat dalam meneliti topik partisipasi masyarakat didasarkan pada kebutuhan untuk memahami konteks, dan dinamika partisipasi masyarakat dalam situasi yang nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendalami secara mendalam kasus-kasus spesifik partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDES, memperoleh pemahaman yang kaya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, serta menyajikan temuan yang relevan dan kontekstual untuk pengembangan kebijakan dan praktik-praktik terkait partisipasi masyarakat.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data merupakan hal yang terpenting dalam proses penelitian, karena menggunakan teknik pengumpulan data akan mempermudah peneliti mendapatkan sebuah jawaban atau data yang dibutuhkan selama melakukan penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung, dan berdasarkan pendapat langsung dari narasumber kunci. Adapun data lain berupa foto, video, audio dan sebagainya.
- b. Data sekunder merupakan studi kepustakaan yang berbentuk laporan-laporan dari pemerintah Desa Padangan dan juga laporan BUMDES Desa Padangan yang diterima.

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, tape recorder, kamera, dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan (Sadiah, 2015). Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung dan secara terbuka menginformasi kepada sumber data agar para informan mengetahui sejak awal bahwa peneliti sedang melakukan penelitian dengan tujuan memudahkan memperoleh informasi dari informan terkait penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDES di Desa Padangan Kabupaten Kediri Tahun 2017-2023.

Tabel 1.9.3 Jadwal Observasi

Tanggal	Tempat	Keterangan
7-8 Agustus 2023	Desa Padangan	Observasi tempat penelitian
11 Agustus 2023	Desa Padangan	Mengunjungi tempat pelayanan jasa BUMDES di Desa Padangan
12 Agustus 2023	Desa Padangan	Mengamati cara kerja pelayanan jasa di BUMDES
13-15 Agustus 2023	Desa Padangan	Mengamati bagaimana intensitas masyarakat ke BUMDES

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban dari responden dapat dicatat atau direkam dengan alat perekam (Achmadi, 2007). Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden (Abdurrahman, 2006).

Wawancara ini merupakan wawancara yang sifatnya adalah terbuka namun dikaji secara mendalam. Adanya proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan secara mendalam dan detail. Adapun penentuan informan di dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur, yaitu memberikan pertanyaan namun, kedalaman jawabannya berasal dari narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiono, 2005)

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

1.9.4 Sampel atau Informan

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti merasa teknik *purposive* relevan dengan dengan konteks penelitian ini yang membutuhkan informan yang paham akan permasalahan yang terjadi pada kasus penelitian yang sedang diteliti yaitu mengenai partisipasi masyarakat di Desa Padangan terhadap pengelolaan BUMDES.

Tabel 1.9.4 Informan Penelitian

No	Jabatan	Kewenangan
1.	BPD Desa Padangan	Pembina kepengurusan anggota BUMDES
2.	Sekretaris Desa	Mengkoordinasi pembahasan perencanaan
3.	Kepala Urusan Perencanaan	Ketua Perencanaan Program dan Pengelolaan BUMDES
4.	Tokoh Masyarakat	Pengawas BUMDES
5.	PKK	Pengawas BUMDES

6.	Kepala Dusun	Perwakilan Masyarakat
7.	Ketua BUMDES	Pelaksana dan pengelola BUMDES
8.	Masyarakat	Partisipan

1.9.5 Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Selain itu, ada juga instrumen lain untuk melengkapi data-data dan membandingkan dengan data yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2009). Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen penelitian itu sendiri dan ada juga instrumen lainnya yang digunakan seperti data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Untuk mempermudah dalam penyusunan instrumen penelitian, maka perlu dibuat kisi-kisi terlebih dahulu. Tabel dibawah ini merupakan kisi-kisi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Tabel Operasional Variabel Penelitian

Konsep/Teori	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan	Narasumber
Teori Tahapan Partisipasi	Pengambilan Keputusan	Keterlibatan dalam rapat/musyawarah pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan dilaksanakan rapat pengambilan keputusan tentang rencana pengelolaan BUMDES? 2. Apakah semua masyarakat diundang untuk mengikuti rapat tersebut? 3. Berapa jumlah masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut? 4. Apakah terdapat dokumentasi rapat (presensi/foto/video)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kades/Perangkat Desa/Ka. Unit Bumdes 2. Masyarakat 3. BPD
		Penyampaian aspirasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi? 2. Selain melalui musyawarah/rapat apakah terdapat sarana atau media lain dalam menampung aspirasi masyarakat desa? 3. Apakah ada terdapat bidang kerja khusus di Pemerintahan Desa/Bumdes yang menampung aspirasi masyarakat? 4. Apakah ada tokoh masyarakat yang menjadi mediator/fasilitator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah desa/Bumdes? 5. Apa saja aspirasi masyarakat yang paling dominan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Tokoh masyarakat 3. Tokoh agama 4. Ketua RT/RW 5. BPD

			6. Aspirasi apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan/pembangunan Bumdes?	
	Pelaksanaan	Keterlibatan sebagai pelaku/penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran apa saja yang diperbolehkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Bumdes? 2. Apa peran masyarakat pengelolaan BUMDES? 3. Berapa jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDES? 4. Apa saja tugas masyarakatsesuai dengan peran yang dimiliki? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Pengelola BUMDES
		Keterlibatan sebagai pengawas	<p>Pengawasan penggunaan anggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi Bumdes, serta pembagian keuntungan Bumdes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi pengelolaan BUMDES? 2. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan BUMDES? 3. Apakah terdapat mekanisme dan sarana pengawasan pengelolaan Bumdes? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Kepala Desa 3. BPD
	Penerimaan Manfaat	Bentuk manfaat yang diterima	1. Apa saja manfaat yang diterima oleh masyarakat dari hasil pengelolaan Bumdes?	1. Masyarakat

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah ada manfaat dalam bentuk materi atau lapangan pekerjaan? 3. Apakah terdapat peningkatan kesejahteraan yang diterima masyarakat? 	
		Penerima manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa banyak orang yang menerima manfaat? 2. Siapa saja yang menerima manfaat dari Bumdes? <i>Kepada penerima manfaat Bumdes</i> 3. Apa saja manfaat yang anda terima dari Bumdes? 4. Apakah terdapat manfaat yang rutin diterima? 5. Apakah terdapat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dari manfaat yang diterima dari Bumdes? 	1. Masyarakat
	Evaluasi	Keterlibatan dalam pengawasan pemanfaatan anggaran & kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam mengawasi anggaran BUMDES? 2. Apakah anggaran yang ada digunakan sesuai dengan hasil pelaksanaan yang telah dilakukan? 3. Apakah ada badan pengawasan terkait penggunaan anggaran BUMDES? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa (kepala desa, perangkat desa) 2. Pengurus BUMDES 3. BPD

			4. Siapa saja yang terlibat dalam mengawasi anggaran dan pelaksanaan BUMDES?	
		Keterlibatan dalam laporan pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa saja yang terlibat dalam laporan pertanggungjawaban? 2. Apa saja yang harus dibuat dalam laporan pertanggungjawaban? 3. Apa yang harus ditinjau dalam laporan pertanggungjawaban? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus BUMDES 2. Pemerintah desa (kepala desa/perangkat desa) 3. BPD
		Keterlibatan dalam penilaian hasil kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang menjadi penilaian hasil kebijakan? 2. Siapa saja yang terlibat dalam menilai hasil kebijakan BUMDES? 3. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap BUMDES? 4. Apakah terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat dalam Bumdes jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya? 5. Apakah terdapat peningkatan manfaat dan keuntungan dari keberadaan Bumdes? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Pemerintah desa (kepala desa/perangkat desa) 3. BPD
		Bentuk partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat sosialisasi tentang alokasi dana BUMDES, Program BUMDES, pelaksana BUMDES, Hasil evaluasi dan hasil capaian BUMDES. 2. Bagaimana bentuk sosialisasi? (Diskusi atau satu arah/tanya jawab) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Pemerintah desa (kepala desa/perangkat desa) 3. Pengurus BUMDES

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah aspirasi dalam bentuk saran/kritikan dari masyarakat diterima oleh BUMDES, Perangkat Desa? 4. Apakah ada konsultasi dari pengelola BUMDES pada masyarakat terkait pengelola BUMDES baik dalam pelaksanaan/perencanaan? 5. Apakah terdapat program BUMDES yang berasal dari saran masyarakat? 6. Apakah masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengelolaan masyarakat? (perencanaan kerja, tugas, pelaksanaan) 	
		Potensi Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja potensi desa yang sedang dikelola? 2. Apa saja potensi desa yang belum dikelola/ sedang dalam perencanaan? 3. Apa saja potensi desa yang dimiliki? 4. Bagaimana BUMDES mengelola potensi desa? 5. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengembangan potensi desa? 6. Apa saja hambatan/tantangan dalam pengelolaan potensi desa? 7. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan potensi desa yang dimiliki? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Pemerintah desa (kepala desa/perangkat desa) 3. Pengurus BUMDES

			<p>8. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap pemerintah desa/BUMDES dalam mengelola potensi desa?</p> <p>9. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan potensi desa?</p> <p>10. Apa saja potensi desa yang dapat dikelola untuk meningkatkan ekonomi lokal desa?</p>	
--	--	--	--	--



1.9.6 Teknis Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

- Coding data: penelitian ini menggunakan coding data secara manual yang merupakan proses pengolahan data yang dilakukan secara manual oleh peneliti tanpa menggunakan alat bantu teknologi. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memberikan label atau kode pada data yang dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen.
- Reduksi: data dikelompokkan dengan panduan variabel yang diturunkan dari indikator dan juga teori, maka data-data yang ditemukan akan direduksi apabila tidak menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana terlampir dalam tabel.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data juga memudahkan kesimpulan sementara dan dapat merencanakan langkah selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan

Aktivitas merumuskan kesimpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya, simpulan ini dapat berupa sementara maupun simpulan akhir.

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teoritik dan Konseptual, Bagan alur berpikir atau penulisan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas gambaran umum dari objek penelitian, memberikan pemahaman menyeluruh tentang konteks dan karakteristik utama yang menjadi fokus studi. Penjelasan ini mencakup deskripsi mengenai lokasi penelitian, profil demografis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat, serta struktur organisasi yang terlibat dalam pengelolaan objek penelitian.

BAB III BENTUK DAN POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BUMDES DI DESA PADANGAN

Dalam bab ini penulis membahas bentuk dan pola partisipasi masyarakat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) secara mendetail, mencakup berbagai cara masyarakat terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan usaha desa.

BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAAT TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES DESA PADANGAN

Dalam bab ini penulis membahas secara mendetail faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)